

## PENGARUH DANA DESA, ALOKASI DANA DESA, DAN PENDAPATAN ASLI DESA TERHADAP INDEKS DESA MEMBANGUN DI KABUPATEN GOWA

Andi Eka Iftitah<sup>1</sup>, Puji Wibowo<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Direktorat Jenderal Perbendaharaan

<sup>2</sup>Politeknik Keuangan Negara STAN

Email: <sup>1</sup>eka.iftitah@kemenkeu.go.id; <sup>2</sup>puji.wibowo@pknstan.ac.id

**ABSTRAK.** Sejalan dengan *Sustainable Development Goals* (SDG) 2030, pemerintah Indonesia berkomitmen membangun desa melalui belanja transfer ke daerah dan dana desa. Dana tersebut diterima oleh pemerintah desa sebagai pendapatan pada pos dana desa dan alokasi dana desa dalam struktur APBDes. Dampak kebijakan transfer ke desa tersebut diukur melalui Indeks Desa Membangun atau dikenal dengan IDM. Peningkatan kapasitas fiskal desa melalui transfer dari pemerintah pusat dan daerah tersebut tidak selalu sejalan dengan perbaikan IDM, seperti yang terjadi pada Kabupaten Gowa. Efektivitas pengelolaan APBDes antara lain dipengaruhi oleh kebijakan pemanfaatan dana desa dalam hal penyertaan modal pada BUMDes. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penggunaan dana desa berupa penyertaan modal pada BUMDes, PADes, dan alokasi dana desa terhadap IDM pada 121 desa di Kabupaten Gowa selama periode 2017-2018. Penelitian ini bersifat kuantitatif menggunakan regresi data panel dan dengan pendekatan random effect model. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan dana desa untuk penyertaan modal BUMDes dan PADes memiliki pengaruh positif terhadap IDM. Sementara itu, alokasi dana desa tidak memberikan efek terhadap IDM. Riset ini memberikan implikasi antara lain perlunya perbaikan tata kelola BUMDes secara berkelanjutan agar dapat mendorong kemandirian desa.

**Kata Kunci:** Dana Desa; Alokasi Dana Desa; Pendapatan Asli Desa; Indeks Desa Membangun; Desentralisasi.

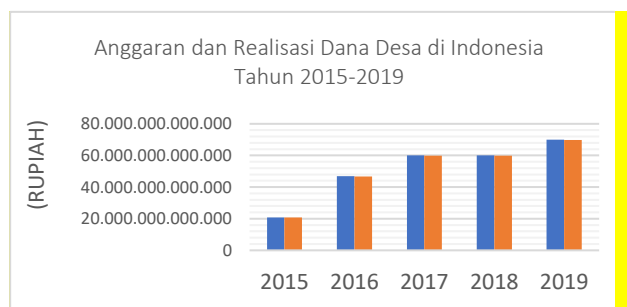
### *THE EFFECT OF VILLAGE FUND, VILLAGE FUND ALLOCATION, AND LOCAL REVENUE ON VILLAGE DEVELOPMENT INDEX IN DISTRICT OF GOWA*

**ABSTRACT.** In line with the 2030 Sustainable Development Goals (SDGs), the Indonesian government is committed to developing villages through transfer spending to the regions and village funds. The funds are received by the village government as income in the village fund post and village fund allocations in the APBDes structure. The impact of the transfer policy to villages is measured through the Village Building Index or known as the IDM. The increase in village fiscal capacity through transfers from the central and local governments is not always in line with the improvement of the IDM such is the case in Gowa Regency. The effectiveness of APBDes management is influenced, among other things, by the policy on the use of village funds in terms of equity participation in BUMDes. This study aims to analyze the effect of using village funds in the form of equity participation in BUMDes, PADes, and village fund allocations on IDM in 121 villages in Gowa Regency during the 2017-2018 period. This is quantitative research using panel data regression and random effects model. The results of the study indicate that the use of village funds for equity participation in BUMDes and PADes has a positive effect on IDM. Meanwhile, the allocation of village funds has no effect on IDM. This research has implications including the need for continuous improvement of BUMDes governance in order to encourage village independence.

**Key Words:** Village Funds; Village Funds Allocation; Local Revenues; Development Village Index; Decentralization.

## PENDAHULUAN

Penguatan peran desa bertujuan untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat desa. Keseriusan negara dalam memberdayakan dan memajukan pembangunan desa dibuktikan melalui lahirnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Sejalan dengan hal tersebut, Indonesia juga turut serta dalam pengesahan agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals* (SDG) 2030 (Bappenas, n.d.). Tujuan TPB/SDG tercermin dalam RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) tahun 2015-2019 (Bappenas, 2016) yang menargetkan penurunan jumlah desa tertinggal hingga lima ribu desa serta meningkatkan jumlah desa maju sedikitnya dua ribu desa di tahun 2019.



Sumber: Diolah dari LKPP Audited Tahun Anggaran 2015-2019

Gambar 1. Tren Anggaran dan Realisasi Penyaluran Dana Desa Nasional Tahun 2015-2019

Pemerintah telah menyalurkan dana desa untuk membangun dan memajukan desa. Untuk itu, pemerintah telah menerbitkan kebijakan mengenai belanja prioritas dalam rangka mengelola dana desa. Peraturan Menteri Desa PDTT (Permendesa PDTT) nomor 5 tahun 2015 meregulasi pendirian dan pengembangan BUMDes sebagai prioritas penggunaan dana desa. Penelitian terdahulu

memaparkan bahwa BUMDes yang dikelola dengan baik akan berdampak terhadap peningkatan ekonomi desa (Alkadafi, 2014; Ramadana *et al.*, 2013; Berlian Ramadana & Ribawanto, 2013); peningkatan pendapatan asli desa (Dewi & Irama, 2018; Ridlwan, 2014), menyerap tenaga kerja, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa (Kasila & Kolopaking, 2018; Tangkumahat *et al.*, 2017).

Hingga tahun 2019, jumlah BUMDes di Indonesia mencapai 39.226 kegiatan (Kemendesa PDTT, 2020). Peningkatan ini berbanding lurus dengan peningkatan jumlah rupiah dana desa yang telah disalurkan ke desa. Penelitian Arifin *et al.* (2020) menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara penyaluran dana desa dengan peningkatan jumlah BUMDes (Arifin *et al.*, 2020). Peningkatan ini dapat diartikan bahwa pemerintah setempat telah memberdayakan BUMDes dan lebih mampu mengelola kendala maupun permasalahan yang dihadapi oleh BUMDes.

Pendanaan merupakan salah satu masalah yang kerap dihadapi oleh BUMDes (Tunberg; Wessels dan Nel; dalam Arifin *et al.*, 2020). Pendanaan diperlukan sebagai modal untuk membangun, mengelola, dan bahkan merevitalisasi BUMDes. Keberadaan dana desa menjadi salah satu sumber pendanaan atau permodalan bagi pemerintah desa untuk mengelola BUMDes (*local-enterprises*) (Arifin *et al.*, 2020).

Salah satu kabupaten yang mengalami peningkatan signifikan nilai penyeteroran modal BUMDes yang bersumber dari dana desa, yaitu Kabupaten Gowa. Pemerintah desa di Kabupaten Gowa memanfaatkan BUMDes sebagai sarana untuk untuk memajukan desa dan kehidupan masyarakat setempat. Realisasi pendirian BUMDes di Kabupaten Gowa belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat desa yang

belum memiliki BUMDes (Prawitno et al., 2019).

BUMDes Tanralili Raya di Desa Manimbahoi merupakan salah satu BUMDes yang telah berkontribusi memajukan desa (Harjowiryo, 2018). Selain itu, terdapat pula BUMDes Bonto Sunggumanai di Desa Sunggumanai yang turut mendorong perkembangan ekonomi-sosial desa. Pada tahun 2019, BUMDes Bonto Sunggumanai terpilih sebagai BUMDes berprestasi tingkat Sulawesi Selatan.

Karakteristik desa di Kabupaten Gowa cenderung homogen berada pada status berkembang (Kemendesa PDTT, 2019). Berdasarkan kebijakan pemerintah, desa dengan status berkembang dapat menggunakan BUMDes sebagai sarana untuk memajukan ekonomi setempat (Permendesa PDTT nomor 9 Tahun 2017). Desa di Kabupaten Gowa memanfaatkan BUMDes sebagai sarana untuk memperoleh nilai tambah ekonomi dari potensi lokal yang dimiliki. Selain memanfaatkan kondisi alam, Kabupaten Gowa memiliki jumlah penduduk yang tinggi sebagai modal sumber daya manusia untuk mengelola BUMDes. Kabupaten Gowa memiliki jumlah penduduk tertinggi kedua (8,73%) setelah Kota Makassar (BPS Provinsi Sulawesi Selatan, 2019).

Dari segi pendanaan, Kabupaten Gowa menerima penyaluran dana desa tertinggi ke-4 di Sulawesi Selatan. Meskipun anggaran dan penyerapan nasional dana desa pada tahun 2018 cenderung stagnan dibanding tahun sebelumnya, namun realisasi dana desa di Kabupaten Gowa meningkat. Pada periode tersebut, belanja penyertaan modal BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) tahun 2018 meningkat lebih dua kali lipat dari tahun sebelumnya. Seiring keberadaan BUMDes, tingkat kesejahteraan di Kabupaten Gowa dinilai

membaik. Persentase penduduk miskin di Kabupaten Gowa tahun 2017 (8,4%) berada di bawah rata-rata provinsi (9,4%).



Sumber: Ditjen Perbendaharaan, Kementerian Keuangan (diolah penulis)

Gambar 2. Tren Realisasi Penyaluran Dana Desa per Kecamatan di Kabupaten Gowa Tahun 2017-2018

Walau mengalami peningkatan indikator kesejahteraan, persentase pengangguran terbuka di Kabupaten Gowa (6,14%) masih berada di atas Provinsi Sulawesi Selatan (5,61%) (Pemprov Sulawesi Selatan, 2020). Selain itu, jumlah desa maju di Kabupaten Gowa dinilai masih sedikit walaupun telah berhasil memajukan desa yang semula bertatus tertinggal menjadi desa dengan status berkembang (Kemendesa PDTT, 2019). Berdasarkan data pemutakhiran status desa tahun 2019, Kabupaten Gowa belum memiliki desa yang bertatus mandiri.

Selain dana desa (DD), belanja pemerintah desa lingkup Kabupaten Gowa juga bersumber dari alokasi dana desa (ADD). ADD telah dikenal lebih dulu dalam bentuk *block grant* (Setyoko, 2011; Solikin, 2018b) sebelum pemerintah pusat menetapkan kebijakan penyaluran dana

desa pada tahun 2015. ADD bertujuan untuk mendanai kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa (Permendagri 37, 2007).

ADD termasuk pendapatan transfer yang memiliki porsi signifikan dalam struktur APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa). Hal ini menjadikan ADD memiliki porsi signifikan dalam mendanai belanja pemerintah desa. Data Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Gowa menunjukkan porsi terbesar penggunaan ADD tahun 2018 berada pada belanja bidang pemberdayaan pemerintahan desa.

Walau porsinya signifikan, tingkat efektivitas dan dampak ADD perlu dikaji lebih lanjut. Peneliti terdahulu berargumen bahwa efektivitas ADD dipengaruhi oleh partisipasi warga dan akuntabilitas aparatur desa (Putra et al., 2012; Setyoko, 2011). Di sisi lain, ADD kurang efektif ketika warga desa kurang memahami mengenai kebijakan ADD, terdapat distorsi perilaku masyarakat, dan pengelolaan ADD yang kurang inovasi (Malik, 2008 dalam Sutikno & Suliswanto, 2018).

Selain dana desa dan ADD, sumber pendanaan belanja pemerintah desa lingkup Kabupaten Gowa didukung dari Pendapatan Asli Desa (PADes). Peran strategis PADes berada pada kemampuannya untuk memberikan kelonggaran fiskal bagi pelaksanaan anggaran desa. Jika penggunaan dana desa dan alokasi dana desa terikat pada penggunaan belanja prioritas dan/atau belanja *mandatory*, maka PADes dapat digunakan terlepas dari belanja *mandatory*.

Selain itu, keberadaan PADes juga memperkuat kemandirian fiskal pemerintah desa. Semakin bertambahnya PADes, maka semakin berkurang tingkat ketergantungan

pemerintah desa terhadap pendapatan transfer sebagai sumber pendanaan belanja pemerintah desa. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa PADes memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap belanja desa bidang pekerjaan umum dan belanja desa bidang pertanian (Purbasari *et al.*, 2015). Kemudian, terdapat hubungan signifikan antara PADes dan belanja desa (Purbasari *et al.*, 2015).

Untuk mengevaluasi usaha membangun desa sesuai RPJMN 2015-2019 dan komitmen TPB/SDGs, pemerintah menyusun indeks desa membangun (IDM) (Kemendesa PDTT, 2015). IDM tahun 2015 menunjukkan hanya 5% desa di Indonesia berstatus mandiri. Selebihnya, desa berstatus tertinggal, sangat tertinggal, berkembang, dan maju dengan persentase 46%; 31%; 18%; dan 0% (Kemendesa PDTT; 2015).

Pemerintah memerlukan IDM untuk mengukur efektivitas pembangunan desa (Kementerian Desa PDTT, 2015). Di sisi lain, desa di Indonesia memiliki karakteristik yang berbeda-beda sehingga perlu alat ukur yang mampu menangkap fenomena multidimensional kondisi di desa.

Penelitian mengenai pengaruh dana desa khususnya yang digunakan sebagai modal BUMDes, alokasi dana desa, dan pendapatan asli desa terhadap IDM masih sangat terbatas. Sebagai bagian dari belanja prioritas, perlu dilakukan uji dampak serta efektivitas dana desa yang digunakan melalui BUMDes. Namun, belum terdapat penelitian yang menjelaskan kebijakan tersebut terhadap pembangunan dan kemajuan desa, khususnya terhadap IDM.

Riset terdahulu masih sebatas pada analisis dana desa terhadap peningkatan BUMDes (Arifin *et al.*, 2020; Mutolib *et*

*al.*, 2019; Raharjo *et al.*, 2018) dan penyeteroran modal BUMDes (Tangkumahat *et al.*, 2017). Adapun riset mengenai BUMDes terhadap kemajuan desa umumnya berupa penelitian kualitatif (Wardhana *et al.*, 2018).

Parameter lain yang digunakan untuk menguji dampak dan efektivitas dana desa, antara lain tingkat kemiskinan (Lalira *et al.*, 2018; Ramly & Mursyida, 2017; Sari & Abdullah, 2017; Sigit & Kosasih, 2020; Susilowati & Hadi, 2017) maupun *output* kegiatan belanja pemerintah desa (Muslihah *et al.*, 2019; Purbasari *et al.*, 2015). ADD diuji melalui dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat (Triyono, 2018) maupun tingkat kemiskinan (Azwardi & Sukanto, 2014; Sigit & Kosasih, 2020). Sementara itu, riset PADes masih sebatas pada dampaknya terhadap belanja pemerintah desa.

Di sisi lain, analisis dampak kebijakan terhadap IDM masih berupa pengujian dana desa secara umum. Gani *et al.* (2020) menemukan bahwa dana desa berpengaruh positif terhadap IDM di 5 desa Kecamatan Bulukumpa. Sebaliknya, Yulitasari & Tyas (2020) menemukan bahwa kenaikan rupiah dana desa tidak berpengaruh terhadap kenaikan skor IDM. Kedua penelitian tersebut belum menjelaskan pengaruh dari ADD dan PADes yang memiliki porsi rupiah yang signifikan serta merupakan sumber pendanaan pemerintah desa yang telah lebih dulu hadir sebelum dana desa.

Selain itu, riset terdahulu belum mempertimbangkan jeda waktu (*lag*) yang diperlukan suatu kebijakan atau hasil pembangunan dapat memberikan dampak terhadap *output* maupun *outcome*. Penelitian tersebut juga belum mempertimbangkan pengaruh jumlah penduduk sebagaimana pertambahan

penduduk dan sumber daya manusia akan berpengaruh terhadap bagaimana belanja pemerintah desa akan diserap. Kemudian, masih terdapat penggabungan data *rural* dan *urban* sehingga berpotensi bias.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut melalui rumusan masalah sebagai berikut: (1) Apakah penggunaan dana desa di kegiatan pemberdayaan masyarakat desa berupa penyeteroran modal BUMDes tahun anggaran 2017-2018 berpengaruh terhadap skor indeks desa membangun di desa lingkup Kabupaten Gowa tahun 2018-2019? (2) Apakah alokasi dana desa tahun anggaran 2017-2018 berpengaruh terhadap skor indeks desa membangun di desa lingkup Kabupaten Gowa tahun 2018-2019? (3) Apakah pendapatan asli desa tahun anggaran 2017-2018 berpengaruh terhadap skor indeks desa membangun di desa lingkup Kabupaten Gowa tahun 2018-2019?

## **TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

### **Teori Pengeluaran Pemerintah**

Terbatasnya sumber daya anggaran menjadi alasan perlunya kebijakan keuangan belanja publik yang efektif dan efisien. Kebijakan yang berkaitan dengan pengeluaran dan penerimaan pemerintah merupakan alat kebijakan fiskal untuk memajukan perekonomian sebagaimana dalam teori Keynes (Solikin, 2018a). Melalui konteks ekonomi makro, Boediono dalam Azwar (2016) membagi pengeluaran pemerintah dalam tiga kelompok (Azwar, 2016), antara lain:

1. pengeluaran pemerintah dalam pengadaan barang dan jasa;
2. pengeluaran pemerintah untuk pembayaran gaji pegawai; dan
3. pengeluaran pemerintah dalam bentuk belanja transfer.

Pengeluaran pemerintah (*government expenditure*) merupakan salah satu komponen pembentuk permintaan agregat. Konsep pendapatan nasional berupa persamaan  $Y = C + I + G + (X - M)$ . Rostow-Musgrave mengungkapkan bahwa belanja pemerintah pada tahap awal pembangunan bernilai lebih besar karena pembangunan cenderung berupa pembangunan fisik atau belanja modal (Aladejare, 2013).

Belanja modal (*capital expenditure*) berdampak lebih signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dibandingkan belanja rutin (*recurrent expenditure*) (Aladejare, 2013). Berdasarkan hipotesis ini, desa memerlukan belanja prioritas untuk membangun perekonomian, termasuk penyeteroran modal BUMDes bagi pembangunan desa. Kesuksesan pelaksanaan anggaran dipengaruhi pilihan belanja (*expenditure*) yang dilakukan sesuai dengan perencanaan (Schiavo-Campo, 2017).

Hukum Wagner (*Wagner's Law*) (Dluhosch & Zimmermann, 2006) berpendapat bahwa peran dan belanja pemerintah (*government expenditure*) akan semakin meningkat seiring semakin bertumbuhnya perekonomian di suatu wilayah (Solikin, 2018a). Dalam konteks tersebut, peran belanja transfer pemerintah pusat melalui dana desa semakin meningkat tiap tahunnya seiring bertumbuhnya perekonomian di desa.

## Teori Desentralisasi

Melalui desentralisasi, pemerintah dapat mendelegasikan kewenangan pengelolaan keuangan kepada pemerintah level bawahnya. Efisiensi ekonomi dari desentralisasi timbul ketika belanja pemerintah lokal lebih spesifik berdasarkan karakteristik tiap wilayah sehingga menghasilkan output lebih baik dibanding belanja yang tidak sesuai prioritas kebutuhan lokal oleh pemerintah pusat (Oates, 1999). Kualitas sumber daya aparat desa dan kemampuan perencanaan desa yang belum memadai mengakibatkan output tidak sesuai kebutuhan (Wasistiono and Irwan dalam Azlina *et al.*, 2017).

## Pembangunan Desa di Negara Lain

Terdapat berbagai bentuk pembangunan di desa menggunakan dana dari pemerintah. Pemerintah China memiliki program pembangunan desa (*community-based development program*). Park & Wang (2010) menemukan faktor pemerintah sangat berpengaruh terhadap distribusi manfaat program (Park & Wang, 2010). Kemudian, Thailand memiliki program *Thailand Village and Urban Community Fund* (Boonperm *et al.*, 2013).

## Dana Desa

Dalam rangka meningkatkan pelayanan publik di desa; memajukan perekonomian desa; serta peningkatan kesejahteraan desa (Ramly *et al.*, 2017), pemerintah pusat menyalurkan dana APBN kepada pemerintah desa berupa TKDD (Transfer ke Daerah dan Dana Desa). Capaian output nasional tahun 2015-2019 dari sektor penunjang aktivitas ekonomi menunjukkan terdapat 39.226 kegiatan BUMDes hasil penggunaan dana desa. (Kementerian Desa PDTT, 2020). BUMDes diharapkan meningkatkan kesejahteraan, perekonomian, dan pemberdayaan

masyarakat di desa (Arifin *et al.*, 2020). Sejumlah penelitian menunjukkan keberadaan BUMDes berhasil memajukan desa (Mutolib *et al.*, 2019).

### Alokasi Dana Desa

Alokasi dana desa (ADD) merupakan bagian dari pendapatan transfer dalam struktur APBDes yang dianggarkan dari APBD kabupaten/kota. Undang-undang nomor 6 tahun 2014 menetapkan besaran alokasi dana desa yang bersumber dari APBD dianggarkan sebesar minimal 10% dari dana perimbangan kabupaten/kota dikurangi DAK (Dana Alokasi Khusus).

Pemkab Gowa menyusun Peraturan Bupati (Perbup) Gowa nomor 3 tahun 2017 dan Perbup Gowa nomor 8 tahun 2018 sebagai rincian penyaluran ADD. ADD dianggarkan sebanyak 70% disalurkan merata kepada desa dan 30% dianggarkan dengan perhitungan alokasi formula. Alokasi formula mempertimbangkan populasi penduduk, jumlah penduduk miskin, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis di desa.

### Pendapatan Asli Desa

PADes berasal dari hasil pengelolaan potensi asli desa berdasarkan kewenangan desa (Purbasari *et al.*, 2015). PADes dapat berupa kegiatan swadaya; hasil usaha; hasil pemanfaatan aset; partisipasi dan gotong royong; serta PADes lain. Hasil usaha desa umumnya merupakan hasil pengelolaan BUMDes. Dengan PADes, pemerintah desa memiliki sumber daya anggaran yang tidak hanya bergantung pada pendapatan transfer.

### Indeks Desa Membangun (IDM)

IDM menunjukkan kemajuan pembangunan di desa yang terdiri dari tiga indeks, yaitu indeks ketahanan sosial (IKS); indeks ketahanan ekonomi (IKE); dan

indeks ketahanan lingkungan (IKL). Indeks IDM terdiri dari variabel, dan setiap variabel terdiri dari indikator operasional. Setiap indikator memiliki rentang skor 0-5. Penetapan skor tersebut berdasarkan hasil FGD *Analytical Hierarchy Process* (AHP) (Kemendes, 2016).

$$IDM = \frac{(IKS + IKE + IKL)}{3}$$

Klasifikasi status desa ditetapkan dengan ambang batas sebagai berikut:

- 1) Desa Sangat Tertinggal : < 0,491
- 2) Desa Tertinggal : > 0,491 dan < 0,599
- 3) Desa Berkembang : > 0,599 dan < 0,707
- 4) Desa Maju : > 0,707 dan < 0,815
- 5) Desa Mandiri : > 0,815

Pemutakhiran skor IDM tahun berjalan (t) baru dipublikasikan pada tahun berikutnya (t+1).

### Pengaruh Dana Desa berupa Modal BUMDes terhadap Indeks Desa Membangun

Pendapatan transfer di desa merupakan bentuk desentralisasi fiskal. Pemerintah pusat menerapkan kebijakan desentralisasi melalui belanja Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD). Dana ini kemudian diterima oleh pemerintah desa sebagai pendapatan transfer berupa dana desa.

Pemerintah mengupayakan agar belanja pemerintah desa semakin berkualitas terutama yang didanai oleh dana desa. Oleh karena itu, pemerintah menetapkan kebijakan belanja prioritas. BUMDes merupakan salah satu belanja prioritas yang dinilai berdampak terhadap kemajuan desa (Kasila & Kolopaking, 2018). Keberadaan dana desa telah memberikan dampak terhadap BUMDes

(Arifin *et al.*, 2020; Mutolib *et al.*, 2019; Raharjo *et al.*, 2018).

Berdasarkan teori belanja pemerintah, semakin besar belanja pemerintah (G), maka semakin besar nilai pertumbuhan di desa (Y). Kemudian, semakin berkualitas belanja yang dilakukan, efek *multiplier* yang dihasilkan akan signifikan. BUMDes dinilai memiliki efek multiplier sehingga keberadaannya berdampak pada pendukung kesejahteraan desa berupa sektor ekonomi, sosial, maupun lingkungan.

Peneliti menggunakan IDM (Indeks Desa Membangun) sebagai parameter efektivitas dana desa yang digunakan sebagai modal BUMDes terhadap pembangunan di desa. IDM mengukur kemajuan desa dari dimensi ekonomi, sosial, maupun lingkungan. Berdasarkan penelitian Gani *et al.* (2020) dana desa berpengaruh signifikan terhadap komponen IDM. Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis pertama yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah:

H1 : Terdapat pengaruh positif dana desa berupa penyertaan modal BUMDes di desa lingkup Kabupaten Gowa tahun anggaran 2017-2018 terhadap indeks desa membangun tahun 2018-2019.

### **Pengaruh Alokasi Dana Desa terhadap Indeks Desa Membangun**

ADD melengkapi sumber pendanaan belanja pemerintah desa untuk mendorong pertumbuhan di desa. ADD berperan melalui tiga hal, yaitu (1) belanja pada jenis yang berdampak langsung terhadap pembangunan desa; (2) belanja pada sektor yang tidak secara langsung berdampak misalnya pada pembayaran penghasilan aparatur atau perangkat pemerintahan desa,

dan/atau (3) menjadi penambah kelonggaran fiskal pemerintah desa.

Dengan belanja ADD yang tepat, akan berdampak pada output dan outcome pembangunan di desa. Pengukuran dampak dari dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan direpresentasikan oleh indeks komposit IDM. Efektivitas penggunaan ADD dalam belanja pemerintah desa dipengaruhi oleh partisipasi warga dan akuntabilitas aparatur desa (Putra *et al.*, 2012; Setyoko, 2011). Hal yang menyebabkan ADD menjadi kurang efektif, yaitu pemahaman warga desa mengenai kebijakan ADD, distorsi perilaku masyarakat, dan pengelolaan ADD yang kurang inovasi (Malik, 2008 dalam Sutikno & Suliswanto, 2018).

Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis pertama yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah:

H2 : Terdapat pengaruh positif alokasi dana desa di Kabupaten Gowa tahun anggaran 2017-2018 terhadap indeks desa membangun tahun 2018-2019.

### **Pengaruh Pendapatan Asli Desa terhadap Indeks Desa Membangun**

PADes merupakan kemampuan desa untuk menghasilkan pendapatan dari potensi asli desa. PADes yang memadai dapat menjadi sumber dana belanja (*expenditure*) pemerintah desa. Semakin tinggi PADes, menandakan semakin besar sumber daya keuangan suatu desa dan semakin kurang ketergantungan terhadap dana transfer.

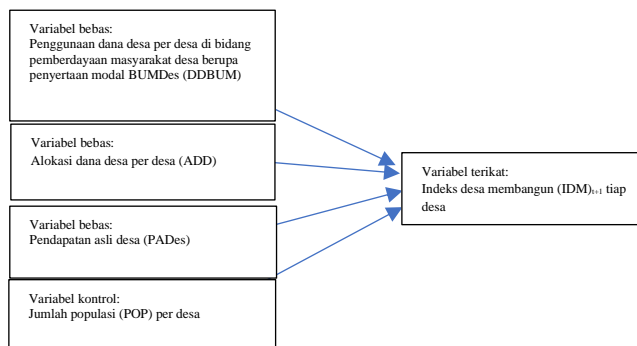
Sumber daya anggaran yang makin besar meningkatkan fleksibilitas anggaran dan kapasitas fiskal daerah sehingga berdampak pada output dan kualitas belanja



pemerintah desa. Purbasari et al. (2015) menemukan bahwa PADes memiliki pengaruh positif signifikan terhadap belanja pemerintah desa di bidang pekerjaan umum. dan belanja desa di bidang pertanian. Dengan demikian, PADes memiliki kemampuan untuk mempengaruhi pembangunan di desa.

Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis ketiga yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah:

H<sub>3</sub> : Terdapat pengaruh positif pendapatan asli desa di Kabupaten Gowa tahun anggaran 2017-2018 terhadap indeks desa membangun tahun 2018-2019.



Sumber: Diolah oleh Penulis (2021)

Gambar 3. Kerangka Berpikir

## METODE

Penelitian dilakukan dengan pendekatan kuantitatif menggunakan data sekunder melalui analisis regresi data panel. Pengujian dilakukan menggunakan analisis regresi data panel dengan *lag* 1 tahun untuk memotret fenomena dampak pembangunan yang lebih komprehensif. Penelitian dilakukan menggunakan aplikasi *eViews*.

### Populasi dan Sampel

Penelitian dilakukan pada populasi 121 desa di Kabupaten Gowa menggunakan data sekunder berupa data keuangan tahun

2017-2018 dan IDM tahun 2018-2019. Pemilihan data mempertimbangkan periode publikasi resmi data IDM pada Kabupaten yang mengalami kenaikan signifikan belanja dana desa di bidang BUMDes. Pemilihan periode sampai 2019 antara lain juga untuk menghindari periode pandemi Covid-19 di tahun 2020 agar dapat diperoleh pengaruh langsung variabel independen terhadap variabel dependen.

Data realisasi penggunaan maupun pendapatan dana desa (DD), alokasi dana desa (ADD), dan asli desa (PADes) tahun 2017-2018 diperoleh dari DPMD Kabupaten Gowa, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Kementerian Keuangan. Data indeks desa membangun (IDM) tahun 2018-2019 diperoleh dari Kementerian Desa PDTT. Data populasi diperoleh dari BPS Provinsi Sulawesi Selatan.

Variabel dana desa merupakan nilai rupiah dana desa (APBN) yang digunakan untuk modal BUMDes per desa. Variabel dana desa dan IDM penelitian ini merupakan pengembangan penelitian Yulitasari dan Tyas (2020) menggunakan model regresi berikut.

$$Y = a + bX + e \dots \dots \dots (1)$$

Variabel alokasi dana desa (ADD) merupakan nilai rupiah realisasi pendapatan ADD (APBD) di tiap desa di Kabupaten Gowa tahun 2017-2018. Pengukuran metode ini pernah dilakukan untuk riset ADD terhadap variabel kesejahteraan (K) (Azwardi & Sukanto, 2014) melalui persamaan berikut.

$$K = \alpha + \beta \text{ADD}_{t-1} \dots \dots \dots (2)$$

Variabel pendapatan asli desa merupakan nilai rupiah realisasi pendapatan asli desa per desa di Kabupaten Gowa tahun anggaran 2017-2018. Penggunaan metode

ini telah dilakukan pada riset sebelumnya mengenai pengaruh PADes terhadap belanja desa (Purbasari *et al.*, 2015).

$$BDPU = a + b_1PADes + b_2ADD + b_3DD + b_4BHPR + e \dots\dots(3)$$

$$BDP = a + b_1PADes + b_2ADD + b_3DD + b_4BHPR + e \dots\dots\dots(4)$$

Penelitian ini menggunakan populasi penduduk per desa Kabupaten Gowa tahun 2017-2018 sebagai variabel kontrol. Data penduduk diperoleh dari data BPS Provinsi Sulawesi Selatan serta BPS Kabupaten Gowa. Dengan demikian, persamaan model penelitian ini sebagai berikut:

Persamaan Model:

$$IDM_{it+1} = \alpha + \beta_1 DDBUM_{it} + \beta_2 ADD_{it} + \beta_3 PADes_{it} + \beta_4 POP_{it} + \epsilon_{it} \dots\dots\dots(5)$$

Keterangan:

IDM = Indeks desa membangun tingkat desa per tahun

DDBUM= Realisasi dana desa kegiatan pemberdayaan masyarakat untuk belanja penyertaan modal BUMDes di tingkat desa per tahun

ADD = Realisasi pendapatan alokasi dana desa tingkat desa per tahun

PADes = Realisasi pendapatan asli desa tingkat desa per tahun

POP = Jumlah populasi di desa per tahun (variabel kontrol)

$\alpha$  = konstanta

$\beta$  = koefisien

e = komponen error

i = data desa

t = data tahun

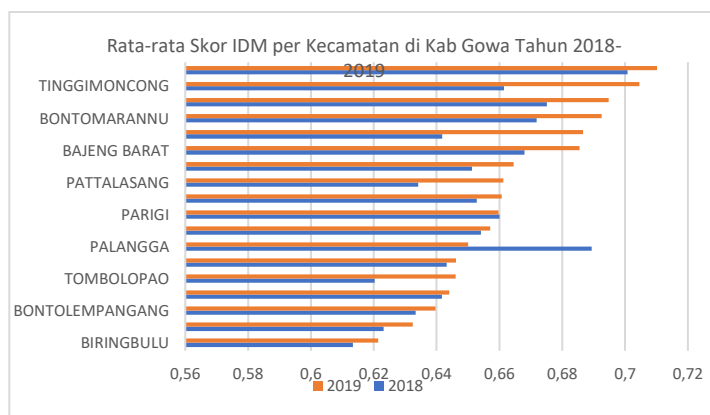
### Gambaran Umum Kewilayahan Kabupaten Gowa

Kabupaten Gowa terdiri dari 18 kecamatan, 46 kelurahan, dan 121 desa (Permendagri Nomor 137 Tahun 2017). Wilayah Kabupaten Gowa seluas

1.883,32km<sup>2</sup> dengan penduduk sebanyak 752.896 jiwa. Kecamatan Somba Opu merupakan satu-satunya kecamatan yang tidak memiliki desa.

Desa di Kabupaten Gowa pada tahun 2018 berstatus tertinggal, berkembang, dan maju (Kemendesa PDTT, 2018). Desa berkembang sebanyak 108 desa atau 89%. Desa maju dan tertinggal masing-masing sebanyak delapan dan lima desa (7% dan 4%). Status desa pada tahun 2019 terbagi menjadi desa maju dan desa berkembang.

Sesuai Gambar 4, rata-rata IDM tertinggi 2019 dimiliki oleh Kecamatan Bajeng. Rata-rata kenaikan tertinggi berasal dari Kecamatan Bungaya sebesar 0,04487 atau 6,99%. Terdapat sembilan kecamatan dengan skor di bawah rata-rata Kabupaten Gowa di tahun 2019. Rata-rata terendah dimiliki oleh Kecamatan Biringbulu. Kecamatan Parigi dan Pallangga mengalami penurunan skor di tahun 2019.

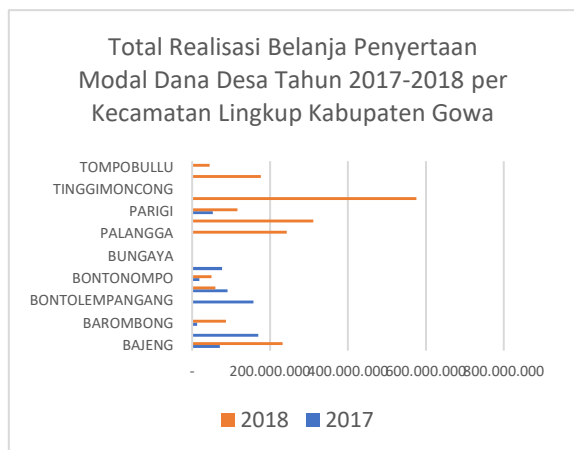


Sumber: Kemendesa PDTT. Diolah Penulis dari Microsoft Excel

Gambar 4 Rata-rata IDM per Kecamatan di Kab. Gowa Tahun 2018-2019

Belanja kegiatan pemberdayaan masyarakat desa meningkat Rp1.373.637.642 atau 31% dari tahun 2017 sebesar Rp4.448.932.308 menjadi Rp5.822.569.950. Kenaikan didominasi oleh belanja pada kegiatan penyertaan

modal BUMDes. Gambar 5 menampilkan rincian realisasi penggunaan dana desa untuk BUMDes.



Sumber: Kementerian Keuangan dan Dinas PMD Kab. Gowa. Diolah Penulis

Gambar 5 Realisasi Penggunaan Dana Desa di Belanja Penyertaan Modal Dana Desa TA 2017-2018 per Kecamatan

Realisasi alokasi dana desa (ADD) menurun Rp84.425.878 menjadi Rp86.022.518.422 di tahun 2018 dari semula Rp86.106.944.300 di tahun 2017. Secara total per kecamatan, ADD di Kecamatan Bajeng satu-satunya yang meningkat Rp1.875.306 dari semula Rp7.202.241.017 di tahun 2017 menjadi Rp7.204.116.323 di tahun 2018. Kenaikan tertinggi di Kecamatan Bajeng berasal dari Desa Maradekaya sebesar Rp749.178.114.

PADes meningkat sepanjang tahun 2017-2018 mencapai 1151%. Total PADes tahun 2018 sebesar Rp28.439.179.525 atau rata-rata sebesar Rp235.034.542 per desa. Kecamatan Pattalassang memperoleh rata-rata per desa tertinggi sebesar Rp298.221.896. Rata-rata per desa terendah tahun 2018 diperoleh Kecamatan Bontonompo Selatan senilai Rp204.314.795.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pemilihan Model

Penulis melakukan Uji Hausman, Uji LM-Breusch Pagan, serta Uji Chow untuk menentukan model estimasi terbaik menggunakan aplikasi *eViews*. Hasil Uji Chow pada Tabel 1 menunjukkan bahwa nilai *Prob* pada *Cross-section Chi-square* sebesar 0,0000 ( $\text{Prob} < 0,05$ ) sehingga menolak hipotesis  $H_0$ . Hasilnya, model FEM (*Fixed Effect Model*) dinilai lebih baik dari pada CEM (*Common Effect Model*).

Tabel 1 Hasil Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests

Equation: FEM

Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	2.865388 (120,117)		0.0000
Cross-section Chi-square	331.755662	120	0.0000

Sumber: Diolah penulis dari *eViews*

Hasil Uji Hausman pada Tabel 2 menunjukkan nilai *Prob* pada *Cross-section random* sebesar 0,0537 ( $\text{Prob} > 0,05$ ) sehingga hasil uji ini menerima hipotesis  $H_0$ . Maka, model REM (*Random Effect Model*) dinilai lebih baik dari FEM pada persamaan regresi ini.

Tabel 2 Hasil Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test

Equation: REM

Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	9.315734	4	0.0537

Sumber: Diolah penulis dari *eViews*

Berdasarkan hasil pengujian di Tabel 3, diperoleh nilai *Both* pada *Breusch-Pagan* sebesar 0,0000 ( $< 0,05$ ) sehingga disimpulkan  $H_0$  ditolak. Model REM lebih baik dari model CEM. Berdasarkan hasil

dari ketiga pengujian, maka model terbaik mengestimasi data panel penelitian ini yaitu REM (*Random Effect Model*).

Tabel 3 Hasil Uji Lagrange Multiplier

Lagrange Multiplier Tests for Random Effects

Null hypotheses: No effects

Alternative hypotheses: Two-sided (Breusch-Pagan) and one-sided (all others) alternatives

	Test Hypothesis		
	Cross-section	Time	Both
Breusch-Pagan	24.88535 (0.0000)	1.008213 (0.3153)	25.89356 (0.0000)

Sumber: Diolah penulis dari *eViews*

### Pengujian Model Regresi

Uji F digunakan untuk menguji signifikansi pengaruh keseluruhan variabel independent secara bersamaan terhadap variabel dependen (Ghozali dan Ratmono, 2017). Uji t dilakukan untuk mengetahui variabel independent yang secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Uji koefisien determinasi  $r^2$  atau  $R^2$  untuk menilai kemampuan model regresi dalam menjelaskan data atau dikenal dengan *goodness of fit* (Gujarati, 2003).

### Analisis Persamaan Regresi

Hasil uji regresi menggunakan REM disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4 Hasil Uji Regresi

Variabel	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
DDBUM	2.16E-10	6.60E-11	3.277819	0.0012
ADD	-4.27E-11	1.03E-10	-0.413075	0.6799
PADES	2.71E-11	1.54E-11	1.764730	0.0789
POP	5.10E-06	1.55E-06	3.295110	0.0011
C	0.662660	0.069604	9.520471	0.0000

Sumber: Diolah penulis dari aplikasi *eViews*

Model persamaan regresi menggunakan pendekatan REM sebagai berikut.

$$IDM_{it} = 0,662660 + 0,00000000021628 DDBUM_{it} - 0,00000000004267 ADD_{it} + 0,00000000002709 PADES_{it} + \varepsilon_{it}$$

Variabel dana desa untuk modal BUMDes (DDBUM), pendapatan asli desa (PADES), populasi (POP) memiliki koefisien bertanda positif. Maka, peningkatan (penurunan) pada variabel independen tersebut berdampak pada peningkatan (penurunan) pada variabel IDM. Konstanta hasil persamaan regresi menunjukkan jika variabel independen DDBUM, ADD, dan PADES mempunyai nilai yang konstan, maka nilai IDM sebesar 0,662660 pada desa i dan tahun t.

Berdasarkan hasil Uji F pada Tabel 5 diperoleh nilai *Probability F statistics* sebesar  $0,0000 < 0,05$ . Hal ini menunjukkan bahwa variabel dana desa untuk penyetoran modal BUMDes (DDBUM), ADD, dan PADES secara simultan berpengaruh signifikan terhadap IDM.

Tabel 5 Uji Signifikansi Uji F

Mean dependent			
R-squared	0.137797	var	0.387643
Adjusted R-squared	0.123245	S.D. dependent var	0.028541
S.E. of regression	0.026725	Sum squared resid	0.169267
F-statistic	9.469338	Durbin-Watson stat	2.050708
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber: Diolah penulis dari aplikasi *eViews*

Uji t merupakan pengujian yang digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel-variabel independen (DDBUM, ADD, dan PADES) secara parsial terhadap variabel dependen (IDM). Hasil uji t setiap variabel disajikan pada Tabel 6.

Tabel 6 Hasil Uji t

Variabel	Coefficient	t-statistic	One-Tailed Prob	Kesimpulan	Signifikansi
DDBUM	2.16E-10	3.277819	0.0006	< 0,05	Signifikan,
ADD	-4.27E-11	-0.413075	0.3399	> 0,05	Tidak Signifikan
PADES	2.71E-11	1.764730	0.0395	< 0,05	Signifikan
POP	5.10E-06	3.295110	0.0006	< 0,05	Signifikan

Sumber: Diolah penulis dari aplikasi  
eViews

Berdasarkan pengujian pada Tabel 7, nilai *Adjusted R-squared* sebesar 0,123245 yang berarti 12,32% variabel IDM dapat dijelaskan oleh persamaan regresi ini. Dengan kata lain, sebesar 87,68% variabel IDM dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak dimasukkan dalam persamaan ini.

Tabel 7 Uji Koefisien Determinasi

	Mean dependent	
R-squared	0.137797var	0.387643
<i>Adjusted R-squared</i>	0.123245	S.D. dependent var 0.028541
S.E. of regression	0.026725	Sum squared resid 0.169267
		Durbin-Watson
F-statistic	9.469338stat	2.050708
Prob(F-statistic)	0.000000	

Sumber: Diolah penulis dari aplikasi  
eViews

Berdasarkan pengujian yang dilakukan, variabel dana desa untuk modal BUMDes dan variabel PADes memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap variabel IDM. Hanya variabel ADD yang memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap IDM.

### Pengaruh Dana Desa Penyotoran BUMDes terhadap Indeks Desa Membangun

Berdasarkan hasil pengujian, variabel DDBUM berpengaruh signifikan dengan arah positif terhadap variabel IDM. Nilai

*Probability* variabel DDBUM dengan *one-tailed probability* signifikansi 5% sebesar  $0,0006 < 0,005$ . Nilai *t-statistics* atau *t*-hitung lebih besar dari *t*-tabel ( $3,277819 > 1,65798$ ) Koefisien bernilai positif sehingga terdapat hubungan searah antara variabel DDBUM. Sehingga hipotesis  $H_1$  bahwa terdapat pengaruh positif dana desa bidang pemberdayaan masyarakat berupa penyertaan modal BUMDes di desa lingkup Kabupaten Gowa tahun anggaran 2017-2018 terhadap indeks desa membangun tahun 2018-2019, diterima.

Belanja pemerintah lokal menyesuaikan kebutuhan dan potensi di daerah (Oates, 1999). Pemerintah desa memiliki keunggulan informasi potensi aset desa yang bernilai produktif. Penggunaan dana desa untuk pembangunan, pendirian dan revitalisasi BUMDes dengan tepat merupakan implementasi dari keunggulan informasi pemerintah setempat untuk membangun desa. Hal ini mendukung pengaruh signifikan dana desa sebagai wewenang pemerintah desa terhadap kemajuan desa yang diukur dalam IDM (Gani *et al.*, 2020).

Sejak penyaluran dana desa, jumlah BUMDes meningkat hingga 50% atau 0,3 BUMDes per kapita (Arifin *et al.*, 2020). BUMDes didorong bergerak di lima sektor prioritas, yaitu pengelolaan sumber daya alam, industri pengolahan berbasis sumber daya lokal, jaringan distribusi, sektor keuangan/permodalan, dan pelayanan publik (Kementerian Keuangan, 2017).

Dampak langsung BUMDes terhadap indikator IDM, antara lain peran BUMDes dalam penyediaan jasa kantor pos, jasa logistik, serta akses penduduk desa untuk memperoleh kredit (Kemendesa PDTT, 2020). BUMDes juga berperan meningkatkan indikator sosial dan

penyediaan sarana vital di desa. BUMDes Tanralili Raya di Desa Manimbahoi, Kabupaten Gowa didirikan melalui penyetoran modal dana desa (Harjowiryo, 2018). BUMDes Tanralili Raya berperan di industri pengolahan air mineral, pengelolaan peternakan dan perikanan, perdagangan hasil pertanian, pengelolaan industri, dan pengelolaan biro jasa (Harjowiryo, 2018). Penambahan modal di tahun 2017 dari dana desa dimanfaatkan sebagai modal pembangunan tempat pengolahan air minum dalam kemasan.

Total realisasi dana desa penyetoran modal BUMDes di Kabupaten Gowa meningkat di tahun 2018 sebesar Rp1.244.785.289 atau 191%. Nilai realisasi 2017 sebesar Rp651.388.331 menjadi sebesar Rp1.896.173.620 di tahun 2018. Mayoritas desa di Kabupaten Gowa berstatus berkembang sehingga dana desa diprioritaskan untuk pemberdayaan masyarakat desa dan memperkuat lumbung ekonomi desa.

Dampak ekonomi-sosial BUMDes, antara lain penyerapan tenaga kerja lokal sehingga menurunkan tingkat pengangguran; peningkatan PADes; perkembangan usaha ekonomi rumah tangga maupun swasta yang meningkatkan pendapatan masyarakat; dan penurunan kemiskinan (Kementerian Keuangan, 2017).

BUMDes di wilayah lainnya juga membuktikan dampak sosial-ekonomi. BUMDes Pongkok di Klaten mengalokasikan sejumlah laba BUMDes sebagai dana pendidikan (kartu cerdas desa), jaminan kesehatan, dan lembaga zakat desa. Hal serupa juga dilakukan oleh BUMDes Panggungharjo di Bantul (Kementerian Keuangan, 2017).

BUMDes dapat memberdayakan masyarakat melalui penyerapan tenaga kerja (Kasila & Kolopaking, 2018; Tangkumahat *et al.*, 2017) dan menguatkan ekonomi desa (Ramadana *et al.*, 2013). Peningkatan belanja pemerintah pada pengembangan BUMDes terjadi di Desa Hanura, Kabupaten Pesawaran, melalui usaha di bidang pengelolaan pasar; produk dan jasa, serta industri rumah tangga (Mutolib *et al.*, 2019).

### **Pengaruh Alokasi Dana Desa terhadap Indeks Desa Membangun**

Pengujian menunjukkan bahwa ADD tidak berpengaruh terhadap IDM sehingga hipotesis H<sub>2</sub> ditolak. Nilai *Probability* variabel ADD sebesar 0,3399 lebih besar daripada tingkat signifikansi (0,05). Nilai *t-statistics* atau t-hitung lebih kecil dari t-tabel (0,413075 < 1,65798). Maka, variabel ADD tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel IDM. Sementara itu, nilai IDM tetap meningkat walau nilai pendapatan ADD lingkup Kabupaten Gowa tahun 2018 menurun.

Berdasarkan data DPMD Kabupaten Gowa, porsi terbesar penggunaan ADD ditujukan untuk belanja bidang pemberdayaan pemerintahan desa. Sebagian ADD bersifat *mandatory* untuk belanja pegawai. Kebijakan tersebut berdampak pada output penggunaan ADD dan dampaknya terhadap IDM. Akibatnya, porsi ADD untuk bidang pelaksanaan pembangunan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan, dan bidang pemberdayaan masyarakat menjadi lebih kecil.

Penggunaan ADD yang didominasi oleh belanja pegawai menyebabkan ADD tidak berpengaruh terhadap belanja bidang lainnya (Purbasari *et al.*, 2015). Komposisi penggunaan ADD (Azwardi & Sukanto, 2014), proporsi belanja aparatur yang besar,

dan operasional pemerintah dapat menurunkan efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat (Yulita, 2016). Belanja rutin (pegawai dan operasional) pemerintah memiliki dampak signifikansi lebih kecil daripada belanja *non*-rutin dalam hal mendorong pertumbuhan ekonomi (Aladejare, 2013).

Kenaikan belanja pegawai dapat dipengaruhi oleh kenaikan jumlah pegawai atau peningkatan nominal penghasilan walaupun jumlah pegawai tetap. Meski bertambahnya jumlah birokrat di desa dapat menurunkan efisiensi penggunaan anggaran, namun peningkatan kapasitas birokrat meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran (Chalil, 2020).

Keberhasilan pemerintah desa mengelola anggaran dipengaruhi beberapa faktor (Yulitasari & Tyas, 2020), yaitu akuntabilitas, transparansi, kebijakan pemerintah (M. T. Sari & Mildawati, 2019), kebermanfaatan hasil pembangunan (Aljannah *et al.*, 2017), dan tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan yang didanai oleh ADD (Darmiasih *et al.*, 2015). Partisipasi masyarakat diperlukan untuk memanfaatkan sumber daya dan potensi desa (Ramly *et al.*, 2017). Penyebab output belum sejalan dengan kebutuhan desa, yaitu kualitas sumber daya aparat desa dan kemampuan perencanaan di tingkat desa yang kurang memadai (Azlina *et al.*, 2017).

Penelitian Setyoko (2011) menemukan bahwa pemerintah desa menilai pelibatan masyarakat dapat memperlambat proses pelaksanaan kegiatan ADD. Akibatnya, kegiatan yang didanai ADD lebih condong kepada kepentingan pemerintah desa daripada masyarakat desa. Dengan demikian, terdapat beberapa fakta empiris yang mendukung bahwa maka realisasi pendapatan ADD tidak memiliki hubungan

berarti terhadap indeks desa membangun di 121 desa lingkup Kabupaten Gowa.

### **Pengaruh Pendapatan Asli Desa terhadap Indeks Desa Membangun**

Berdasarkan hasil pengujian, PADes berpengaruh signifikan dengan arah positif terhadap IDM sehingga hipotesis  $H_3$  diterima. Nilai *Probability* variabel PADes sebesar 0,0395 lebih kecil dari tingkat signifikansi (0,005). Nilai *t-statistics* 1.764730 lebih besar daripada *t*-tabel 1,65798. Tanda koefisien bernilai positif sehingga terdapat hubungan searah variabel PADes terhadap variabel IDM.

PADes sebagai sumber pendanaan belanja pemerintah desa menunjukkan daya kemandirian fiskal. Konsep tersebut memiliki kesamaan dengan kemampuan fiskal secara otonom yang dimiliki oleh daerah yang berpenghasilan PAD yang besar (Wibowo, 2008). Ketika pemerintah lokal tidak mampu menghasilkan pendapatan asli desa (*own-revenue*), maka pemerintah lokal akan sangat bergantung pada pemerintah di atasnya (pusat maupun daerah). Melalui PADes pemerintah desa juga memiliki keleluasaan anggaran dan belanja yang tidak terbatas pada belanja yang bersifat *mandatory*. Dampaknya, pemerintah desa dapat menggunakan PADes untuk mendanai belanja strategis yang berdampak langsung pada dimensi ekonomi, sosial, lingkungan (IDM).

Dengan memiliki PADes, pemerintah desa memiliki keunggulan sumber daya anggaran untuk belanja pemerintah desa. Hal ini menjadikan desa-desa di Kabupaten Gowa memiliki kelonggaran secara fiskal dalam pelaksanaan anggaran sesuai dengan potensi dan kebutuhan spesifik desa di samping memenuhi kebutuhan belanja rutin. Kemandirian fiskal juga memberikan

kesempatan bagi desa untuk melaksanakan belanja yang bersifat strategis dan inovatif.

Pengujian ini juga mendukung riset Purbasari *et al.* (2015) bahwa PADes berpengaruh signifikan terhadap belanja desa dan riset Dewi & Irama (2018) bahwa PADes berdampak terhadap belanja pemerintah desa dan tingkat kemiskinan (Dewi & Irama, 2018).

Penelitian lainnya di Kabupaten Sukoharjo menunjukkan bahwa PADes memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap belanja desa bidang pekerjaan umum dan belanja desa bidang pertanian (Purbasari *et al.*, 2015). Penelitian Dewi dan Irama (2018) menunjukkan bahwa terdapat hubungan langsung pendapatan desa terhadap belanja pemerintah desa dan tingkat kemiskinan desa.

Kemudian dari sudut pandang fungsi PADes sebagai potensi asli desa, salah satunya dikelola berupa BUMDes. BUMDes, bersama potensi dan aset desa yang bernilai produktif, dapat berperan sebagai penggerak ekonomi desa (Ramadana *et al.*, 2013). Keberadaan BUMDes juga dapat mengisi berbagai lini usaha (Arifin *et al.*, 2020; Tangkumahat *et al.*, 2017) yang hadir memenuhi kebutuhan masyarakat desa yang sebelumnya belum tersedia. Pemaparan tersebut mendukung hasil penelitian pengaruh PADes terhadap IDM.

Berdasarkan realisasi pendapatan asli desa di Kabupaten Gowa di tahun 2018, terjadi peningkatan 1151% dari tahun 2017. Rata-rata pendapatan pada tahun 2018 mencapai Rp235.034.542 dengan total Rp28.439.179.525. Dengan demikian, pendapatan asli desa berdampak positif terhadap tingkat kemajuan 121 desa lingkup Kabupaten Gowa.

## SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penggunaan dana desa untuk belanja penyediaan modal BUMDes secara signifikan dan positif mempengaruhi nilai IDM di Kabupaten Gowa. Penelitian ini sekaligus mengonfirmasi riset terdahulu dan teori desentralisasi (Oates, 1999). BUMDes di Kabupaten Gowa berperan dalam penyediaan air bersih, pasar desa, jasa distribusi, maupun penyediaan kredit.
2. PADes secara signifikan dan positif mempengaruhi nilai IDM di Kabupaten Gowa.
3. Variabel ADD yang secara *mandatory* digunakan untuk operasional tidak berpengaruh signifikan terhadap IDM.

Pemerintah kabupaten dan pemerintah desa disarankan untuk merekonsiliasi data aset keuangan dan non keuangan untuk menertibkan pengelolaan keuangan dan pertanggungjawaban dana desa. Hal ini bermanfaat bagi pencatatan pemerintah desa dan pemerintah kabupaten, termasuk pencatatan belanja transfer bantuan keuangan. Diperlukan inventarisasi aset desa secara berkala untuk mengawasi pelaksanaan dana desa sehingga pengadaan aset tidak hanya sebatas pada pertanggungjawaban namun juga meliputi pemeliharaan aset desa.

Peningkatan BUMDes perlu didukung tata kelola (*governance*) yang baik sehingga pemanfaatannya bisa berkelanjutan. Untuk itu diperlukan pelatihan dengan mempertimbangkan faktor efisiensi dan efektivitas. Pemerintah desa dapat mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan asli desa sehingga dapat mendorong kemandirian desa.



Penelitian selanjutnya dapat melakukan riset terkait dana desa terhadap IDM dengan rentang waktu yang lebih panjang dan obyek yang diperluas. Riset selanjutnya juga dapat fokus pada belanja prioritas penggunaan dana desa oleh pemerintah desa terhadap IDM.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku dan Jurnal

- Aladejare, S. A. (2013). Government Spending and Economic Growth: Evidence from Nigeria. In *Munich Personal RePEc Archive* (Vol. 4, Issue 43916).
- Aljannah, S., Basri, S., & Yovita, I. (2017). Evaluasi Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Menunjang Pembangunan Desa di Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu (Studi Kasus: Desa Tambusai Utara Tahun 2013-2014). *JOM Fekon*, 4(1), 813–827.
- Alkadafi, M. (2014). Penguatan ekonomi masyarakat melalui pengelolaan kelembagaan badan usaha milik desa menuju Asean Economic Community 2015. *Jurnal El Riyasah*, 5(1), 32–40.
- Arifin, B., Wicaksono, E., Tenrini, R. H., Wardhana, I. W., Setiawan, H., Damayanty, S. A., Solikin, A., Suhendra, M., Saputra, A. H., Ariutama, G. A., Djuned, P., Rahman, A. B., & Handoko, R. (2020). Village Fund, Village-Owned-Enterprises, and Employment: Evidence from Indonesia. *Journal of Rural Studies*, 79(April), 382–394. <https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2020.08.052>
- Azlina, N., Hasan, A., Desmiyawati, & Muda, I. (2017). The Effectiveness of Village Fund Management (Case Study at Villages in Coastal Areas in Riau). *International Journal of Economic Research*, 14(12), 325–336.
- Azwar. (2016). Peran Alokatif Pemerintah melalui Pengadaan Barang/Jasa dan Pengaruhnya terhadap Perekonomian Indonesia. *Kajian Ekonomi Keuangan*, 20(2), 149–167.
- Azwardi, & Sukanto. (2014). Efektivitas Alokasi Dana Desa (ADD) dan Kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 12(1), 29–41.
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2016). Pedoman Penyusunan Rencana Aksi untuk Tujuan Pembangunan berkelanjutan. Jakarta: Bappenas.
- Berlian Ramadana, C., & Ribawanto, H. (2013). Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai Penguat Ekonomi Desa (Studi di Desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang). *JAP*, 1(6), 1068–1076.
- Boonperm, J., Haughton, J., & Khandker, S. R. (2013). Does the Village Fund matter in Thailand? Evaluating the impact on incomes and spending. *Journal of Asian Economics*, 25, 3–16. <https://doi.org/10.1016/j.asieco.2013.01.001>
- Chalil, T. M. (2020). The Efficiency of Village Government Spending in Indonesia: a Meta-Frontier Analysis. *Journal of Indonesian Economy and Business*, 35(1), 1–16. <https://doi.org/10.22146/jieb.44660>
- Darmiasih, N. K., Sulindawati, N. L. G. E., & Darmawan, N. A. S. (2015). Analisis mekanisme penyaluran alokasi dana desa (ADD) pada pemerintah desa (studi kasus Desa Tri Buana, Kec. Sidemen, Kab.Karangasem). *E-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1*, 1(3).

- Dewi, R. S., & Irama, O. N. (2018). Pengaruh Pendapatan Desa dan Alokasi Dana Desa terhadap Belanja Desa dan Kemiskinan. *Jurnal Riset Akuntansi Multiparadigma (JRAM)*, 5(2), 50–58.
- Dluhosch, B., & Zimmermann, K. W. (2006). *Some Second Thoughts on Wagner's Law* (Vol. 54).
- Gani, A. O. A., Gani, A., & Arief, M. (2020). Dampak Penggunaan Dana Desa Terhadap Indikator Ketahanan Sosial, Ekonomi dan Ekologi Desa Tertinggal Kecamatan Bulukumba Kabupaten Bulukumba. *Paradoks: Jurnal Ilmu Ekonomi*, 3(1), 78–88.
- Gujarati, D. N. (2003). *Basic Econometrics* (Fourth). Mc Graw Hill.
- Harjowiryo, M. (2018). *Kisah Sukses Dana Desa*. Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
- Kasila, M., & Kolopaking, L. M. (2018). Partisipasi Pemuda Desa dalam Perkembangan Usaha BUMDes “Tirta Mandiri” (Studi di Desa Ponggok, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten, Klaten Provinsi Jawa Tengah). *Jurnal Sains Komunikasi Dan Pengembangan Masyarakat [JSKPM]*, 2(1), 43–58. <https://doi.org/10.29244/jskpm.2.1.43-58>
- Kementerian Keuangan. (2017). *Buku Saku Dana Desa*. Kementerian Keuangan.
- Lalira, D., Nakoko, A. T., & Rorong, I. P. F. (2018). Pengaruh Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 18(4), 62–72.
- Muslihah, S., Siregar, H. O., & -, S. (2019). Dampak Alokasi Dana Desa Terhadap Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat Desa di Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Akuntansi, Ekonomi Dan Manajemen Bisnis*, 7(1), 85–93. <https://doi.org/10.30871/jaemb.v7i1.1027>
- Mutolib, A., Nikmatullah, D., Effendi, I., & Viantimala, B. (2019). Kontribusi Dana Desa dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Desa di Desa Hanura, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung. *JSHP*, 3(1), 10–19.
- Oates, W. E. (1999). An Essay on Fiscal Federalism. In *Journal of Economic Literature* (Vol. 37, Issue 3).
- Park, A., & Wang, S. (2010). Community-Based Development and Poverty Alleviation: An Evaluation of China's Poor Village Investment Program. *Journal of Public Economics*, 94(9–10), 790–799. <https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2010.06.005>
- Prawitno, A., Rahmatullah, & Safriadi. (2019). Analisis Peranan Badan Usaha Milik Desa (Bum Desa) Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Desa Di Kabupaten Gowa. *Kritis*, 5 (2)(7), 50–60. <http://journal.unhas.ac.id/index.php/kritis>
- Purbasari, H., Wardana, B. W., & Pangestu, I. A. (2015). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Desa, Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Terhadap Alokasi Belanja Desa Bidang Pekerjaan Umum dan Pertanian (Studi Empiris di Seluruh Desa Se-Kabupaten Sukoharjo). *The 7th University Research Colloquium 2018 Stikes PKU Muhammadiyah Surakarta*, 281–287.
- Putra, C. K., Pratiwi, R. N., & Suwondo. (2012). Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi pada Desa Wonorejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang) Chandra Kusuma Putra, Ratih Nur Pratiwi, Suwondo. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 1(6), 1203–1212.
- Raharjo, T., Sulaeman, A. S., & Sriyani. (2018). Efektivitas Penggunaan Dana Desa. *Bisman (Bisnis & Manajemen): The Journal Of Business And Management*, 1(2), 17–34.

- Ramadana, C. B., Ribawanto, H., & Suwondo. (2013). Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai Penguatan Ekonomi Desa (Studi di Desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 1(6), 1068–1076.
- Ramly, A. R., Wahyuddin, Mursyida, J., & Mawardati. (2017). Implementasi Kebijakan Dana Desa dalam Pengelolaan dan Peningkatan Potensi Desa (Studi Kasus Kec Kuala Kabupaten Nagan Raya). *Seminar Nasional II USM 2017*, 1(Oktober), 379–392.
- Ridlwani, Z. (2014). Urgensi badan usaha milik desa (BUMDes) dalam pembangun perekonomian desa. In *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* (Vol. 8, Issue 3).
- Sari, I. M., & Abdullah, M. F. (2017). Analisis Ekonomi Kebijakan Dana Desa terhadap Kemiskinan Desa di Kabupaten Tulungagung. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 15(01), 34–49.
- Sari, M. T., & Mildawati, T. (2019). Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa, Transparansi, dan Kebijakan Desa terhadap Kesejahteraan Masyarakat. *Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 8(12), 1–17.
- Schiavo-Campo, S. (2017). Government Budgeting and Expenditure Management. In *Government Budgeting and Expenditure Management*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315645872>
- Setyoko, P. I. (2011). Akuntabilitas Administrasi Keuangan Program Alokasi Dana Desa (ADD). *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 11(1), 14–24.
- Sigit, T. A., & Kosasih, A. (2020). Pengaruh Dana Desa terhadap Kemiskinan: Studi Tingkat Kabupaten/Kota di Indonesia. *Indonesia Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 5(2), 105–119.
- Solikin, A. (2018a). Pengeluaran Pemerintah dan Perkembangan Perekonomian (Hukum Wagner) di Negara Sedang Berkembang: Tinjauan Sistematis. *Info Artha*, 2(1), 65–89. <https://doi.org/10.31092/jia.v2i1.237>
- Solikin, A. (2018b). Village Funds Governance: Asistensi Pengelolaan Keuangan Desa pada Dua Desa di Kabupaten Tangerang. *Prosiding Seminar Nasional Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1), 293–298.
- Susilowati, N. I., & Hadi, S. (2017). Pengaruh Alokasi Dana Desa, Dana Desa, Belanja Modal, dan Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Kemiskinan Kabupaten/Kota di Jawa Timur. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 1(2), 189–202.
- Sutikno, S., & Suliswanto, M. S. W. (2018). Evaluation Of Village Fund Allocation Contribution (ADD) on Village Economic Development And Rural Business Growth in Indragiri Hilir Regency. *Kajian Ekonomi Dan Keuangan*, 2(1), 1–14. <https://doi.org/10.31685/kek.v2i1.102>
- Tangkumahat, F. V., Panelewen, V. V. J., & Mirah, A. D. P. (2017). Dampak Program Dana Desa terhadap Peningkatan Pembangunan dan Ekonomi di Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahas. *Agri-Sosioekonomi*, 13(2A), 335. <https://doi.org/10.35791/agrsossek.13.2a.2017.17130>
- Triyono, A. (2018). Pengaruh Alokasi Dana Desa dan Program Pembangunan Desa terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Desa Bukit Lipai Kecamatan Batang Cenaku. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 7(01), 42–55.

- Wardhana, I. W., Arifin, B., Suhendra, M., Wicaksono, E., Saputra, A. H., Tenrini, R. H., Ariutama, I. G. A., Djunedi, P., Solikin, A., Damayanty, S. A., Setiawan, H., Handoko, R., & Rahman, A. B. (2018). *Kajian dana desa Analisis empiris badan usaha milik desa, kesempatan kerja, infrastuktur pada seribu desa di Indonesia*. Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan.
- Wibowo, P. (2008). Mencermati Dampak Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah. *Jurnal Keuangan Publik*, 5(1), 55–84.
- Yulita, R. (2016). Efektivitas Pelaksanaan Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Setako Raya Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu. *JOM FISIP*, 3(2), 1–13.
- Yulitasari, Y., & Tyas, W. P. (2020). Dana Desa dan Status Desa di Provinsi Jawa Tengah. *Journal of Regional and Rural Development Planning*, 4(2), 74–83.  
<https://doi.org/10.29244/jp2wd.2020.4.2.74-83>
- Peraturan dan Dokumen Publik Lainnya**
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa.
- Peraturan Bupati Gowa Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penghasilan Tetap Tunjangan dan Tambahan Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa
- Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan. (2019). Indikator kesejahteraan rakyat Provinsi Sulawesi Selatan 2019. Makassar: BPS Provinsi Sulawesi Selatan.
- Situs Web**
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Diakses dari <https://www.kemendesa.go.id/>. Diakses tanggal 28 Desember 2020.
- Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa. Diakses dari <http://gowakab.go.id/tahun-2018/>. Diakses tanggal 30 Desember 2020.



© 2022 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>).